LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2020

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

KABUPATEN MADIUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2020

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. Tidak terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* perencanaan yang sudah dibuat, hingga sampai pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, dan terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan perencanaan yang telah dibuat.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*peformance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Sedangkan untuk hasilnya dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Tahun 2020.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	100% ≤	Tercapai
2	< 100%	Tidak Tercapai

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun untuk tahun 2020. Pencapaian Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2020 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Target Kinerja Dari Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap 2023 (%)
			Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(%) Realisasi		
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	66,39	59	59,8	101,35	62	96,45
2	Skor Pola Pangan Harapan	80,2	76	-	0	80	-
3	Angka Produksi : (ton) 1. Daging 2. Telur 3. Susu	-	 7764 4474 201	 9551 4490 223	 123,01 100,35 110,94	 10.633 4623 252	 89,82 97,12 88,49

Pengukuran target kinerja diatas dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Madiun di awal tahun kinerja, dan di *breakdown* untuk tiap bidang dan sub bidang . Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kab. Madiun bisa dilihat di lampiran berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketersediaan Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	80,5
2	Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Kesekretariatan	Rp 522.787.418,00	APBD
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rp 200.000.500,00	APBD
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp 1.519.044.598,00	APBD
4. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Rp 187.211.750,00	APBD
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pangan	Rp 150.000.000,00	APBD
6. Program Pengembangan Peternakan	Rp 52.710.500,00	APBD
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Rp 400.000.000,00	APBD
Jumlah	**Rp. 3.031.754.766,00**	

Madiun, 22 Oktober 2020

Pihak Kedua
Bupati Madiun

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Madiun

Drh. LILIN SYARIFAH ANIESAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620218 199103 2 005

3.2.1. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun tahun 2020, disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat

Jumlah anggaran sebesar Rp. 1.519.044.598,- terealisasi sebesar Rp. 1.357.186.962,- atau 89,34 % dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Penanganan Daerah Rawan Pangan anggaran Rp. 3.040.000,- realisasi Rp. 3.040.000,- atau 100 %, realisasi fisik 100%.

b. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok (Pajak rokok) anggaran Rp. 50.346.782,- realisasi Rp. 47.658.200,- atau 94,66 %, realisasi fisik 100 %.

c. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah anggaran Rp. 840.000.000,- realisasi Rp. 770.440.000,- atau 91,72 %, realisasi fisik 100%.

d. Analisis Ketersediaan Pangan anggaran Rp. 22.788.568,- realisasi Rp. 21.520.450,- atau 94,44 %, realisasi fisik 100%.

e. Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan anggaran Rp. 89.987.280,- realisasi Rp. 82.856.916,- atau 92,08 %, realisasi fisik 100%.

f. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah untuk pembinaan kelompok lumbung dan pemberian bantuan isian lumbung anggaran Rp. 399.908.290,- realisasi Rp. 341.624.780,- atau 85,43 %, realisasi fisik 100%.

g. Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk penyuluhan ketahanan pangan keluarga dan pemberian bantuan pangan sehat anggaran Rp. 68.030.278,- realisasi Rp. 63.095.966,- atau 92,75 %, realisasi fisik 100%.

h. Laporan Berkala Dewan Ketahanan Pangan anggaran Rp. 44.943.400,- realisasi Rp. 26.950.650,- atau 59,97 %, realisasi fisik 100 %.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja : "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ". Target skor 61,5 dan tercapai 59,8 atau tercapai 97 %. Skor PPH Ketersediaan tahun 2020 tidak mencapai target (- 3%) ini disebabkan oleh faktor utama turunnya ketersediaan sayur dan buah. Mengingat Kabupaten Madiun bukan merupakan produsen sayur dan buah, maka ketersediaan dua komoditi tersebut bergantung pada daerah lain. Dikarenakan adanya pandemi Covid di tahun 2020, menyebabkan produksi dan rantai distribusi buah sayur terganggu, sehingga mengakibatkan turunnya ketersediaan buah sayur. Turunnya ketersediaan buah sayur ini berbanding lurus dengan turunnya skor PPH Ketersediaan.

Solusi untuk permasalahan kurangnya pasokan buah dan sayur adalah dengan adanya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di lingkungan rumah tangga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan

melalui upaya pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya pada lahan pekarangan maupun pengolahan hasilnya. Pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan adalah potensi yang dapat dikelola sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Upaya pemanfaatan lahan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan sebagai tambahan untuk memenuhi ketersediaan pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berkurangnya pengeluaran keluarga sekaligus dapat memberikan tambahan pendapatan keluarga jika hasil yang diperoleh telah melebihi kebutuhan pangan keluarga.

Data yang digunakan dalam pengukuran skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah data yang dianalisis dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dimanan merupakan data (n-1) dimana (n) adalah tahun berjalan. Dengan demikian, kajian ketersediaan bahan makanan berdasar NBM menggunakan data setahun sebelumnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam analisis ketersediaan ini merupakan data tahun 2019. Mulai dari angka produksi bahan makanan sampai jumlah penduduk tengah tahun. Berikut data dan pembahasan analisis ketersediaan berdasar Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2020;

- ***Produksi***

Data produksi yang disajikan dalam laporan ini, sebagian besar berasal dari data Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Data yang diperoleh antara lain data produksi bahan pertanian, perkebunan, perikanan. Sedangkan data produksi peternakan diperoleh dari internal Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Data produksi yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah hingga didapatkan data ketersediaan yang diperlukan. Data produksi yang terdiri dari beragam bahan makanan ini kemudian kami olah menggunakan ketentuan sebagaimana ditetapkan Badan Ketahanan Pangan

Salah satu tahapnya yaitu menghitung atau mengonversi bahan makanan yang ada. Sebagai contoh adalah data Gabah Kering Giling (GKG) yang diisikan di kolom input, sedangkan yang kita butuhkan adalah data beras di kolom output karena yang dikonsumsi oleh manusia berupa beras. Tabel 3.3 memberikan informasi besaran konversi input ke output bahan makanan berbasis padi-padian.

Tabel 3.3 Besaran Konversi Input ke Output Bahan Makanan Berasis Padi-padian

Jenis Bahan Makanan	**Produksi**		**Konversi Input ke Output**
	Masukan (Input)	**Keluaran (Output)**	
Padi-padian			
Tepung gandum	Biji gandum	Tepung gandum	72

Gabah/Beras	Gabah Kering Giling (GKG)	Beras	64,02
Jagung	Jagung pipilan kering	Jagung pipilan siap konsumsi/pakai	87

Sebagai contoh proses pembacaan tabel tersebut yaitu 100 kg Gabah Kering Giling (GKG) jika diubah menjadi beras, maka dihasilkan beras sebanyak 64,02 kg. Tidak semua bahan makanan membutuhkan konversi, karena jika bahan makanan tersebut sudah dalam bentuk siap konsumsi oleh manusia, maka pengisian angka produksi langsung pada kolom output. Terdapat beberapa perhatian antara lain produksi daging (input) dinyatakan dalam bentuk karkas dari semua jenis ternak dengan output dalam bentuk daging murni. Sedangkan daging unggas tidak lagi mengonversi karkas ke daging murni sehingga pengisian di dalam tabel NBM langsung pada kolom output dan menyesuaikan BDD yang ada. Proses penghitungan konversi di tahap ini digunakan untuk angka produksi bahan makanan. Hingga kemudian semua bahan makanan terisi nilainya atas dasar jumlah produksi dan konversi menurut kebutuhan pada tabel Neraca Bahan Makanan (NBM).

❖ ***Total Penyediaan***

Penyediaan diperoleh dari jumlah produksi bahan makanan dikurangi dengan perubahan stok ditambahkan dengan jumlah total yang diimpor dan dikurangi dengan jumlah total yang diekspor selama periode tersebut. Pada tingkat kabupaten, impor dan ekspor memiliki definisi yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kebutuhan data untuk mencukupi semua informasi yang diperlukan dalam penyusunan tabel NBM diperoleh dari berbagai pihak. Salah satu instrumen penting adalah hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun berupa Analisis Tabel Input – Output (Tabel I-O). Penggunaan Tabel I-O ini untuk memenuhi kekosongan data impor dan ekspor, berupa jumlah barang yang keluar dan masuk di kawasan Kabupaten Madiun. Berikut data total penyediaan menurut kelompok bahan makanannya;

- Kelompok Padi-padian

Tabel 3.4 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Padi-padian (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Gabah		564.295		-	564.295	-	564.295
Beras	534.049	341.898	-	3.371	345.269	89.626	255.643
Jagung		77.711	1.872	53	75.891	1.908	73.982

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penyediaan bahan pangan kelompok padi-padian berasal dari gabah atau beras dan jagung, karena

data produksi kedua komoditas tersebut tersedia di Kabupaten Madiun. Total penyediaan jagung di Kabupaten Madiun sejumlah 73.982 ton, meningkat jika dibandingkan penyediaan tahun 2019 sebesar 42.419 ton. Selain kedua komoditas tersebut, penyediaan bahan pangan kelompok padi-padian juga berasal dari gandum atau tepung gandum. Namun karena gandum tidak diproduksi di Kabupaten Madiun sehingga perhitungan impor gandum tidak dapat dilakukan, maka diputuskan untuk tidak dicantumkan pada tabel NBM. Nilai impor dan ekspor diperoleh dari hasil analisis Tabel Input-Output (Tabel I-O) oleh BPS Kabupaten Madiun salah satunya dengan memanfaatkan data produksi.

- Kelompok Makanan Berpati

Tabel 3.5 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Makanan Berpati (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Ubi Jalar		565		11	576	6	570
Ubi Kayu		42.154		7	42.160	667	41.494

Tabel 3.5 menyajikan informasi total penyediaan bahan pangan kelompok makanan berpati yang terdiri dari umbi-umbian. Komoditas yang tercantum antara lain ubi jalar serta ubi kayu. Data utama yang diperoleh adalah produksi ubi jalar dan ubi kayu. Sedangkan data produksi jenis umbi-umbian yang lain belum tersedia. Total penyediaan ubi jalar dan ubi kayu di Kabupaten Madiun sejumlah 570 ton dan 41.494 ton, meningkat jika dibandingkan penyediaan tahun 2019 sebesar 316 ton dan 31.073 ton.

- Kelompok Gula

Tabel 3.6 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Gula (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Gula Pasir		14.213	-	15	14.228	131	14.097

Tabel 3.6 menyajikan data produksi gula pasir yang berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan kelompok gula. Sebenarnya, selain gula pasir terdapat pula gula mangkok, namun tidak tersedia data produksi gula mangkok di Kabupaten Madiun. Gula pasir merupakan komoditas pangan strategis di Kabupaten Madiun selain beras, sehingga data yang dibutuhkan relatif mudah didapatkan, karena di Kabupaten Madiun terdapat satu pabrik gula yang cukup besar yaitu Pabrik Gula Pagotan. Total penyediaan gula di Kabupaten Madiun sejumlah 14.097 ton, menurun jika dibandingkan penyediaan tahun 2019 sebesar 19.067 ton.

- Kelompok Buah dan Biji Berminyak

Tabel 3.7 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Buah Biji Berminyak(Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Kacang Tanah Berkulit	-	971		-	971	-	971
Kacang Tanah Lepas Kulit	923	554		10	564	6	558
Kedelai	-	1.483		14	1.497	39	1.458
Kacang Hijau	-	3.885		-	3.885	-	3.885

Berdasarkan Tabel 3.7, penyediaan bahan pangan kelompok buah dan biji berminyak terdiri dari kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau. Selain ketiga komoditas tersebut, penyediaan bahan pangan kelompok buah dan biji berminyak juga berasal dari kelapa. Namun tidak terdapat produksi kelapa di Kabupaten Madiun. Pada komoditas tanpa data pada kolom input berarti data yang tersedia merupakan data produksi bahan pangan yang siap dikonsumsi. Sedangkan komoditas dengan kolom input terisi berarti data yang diperoleh merupakan data komoditas yang tidak dapat langsung dikonsumsi, misalnya diperoleh data kacang tanah berkulit, untuk mengisi kolom output berupa kacang tanah lepas kulit maka dikalikan dengan faktor konversi.

- Kelompok Buah-buahan

Tabel 3.8 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Buah-buahan (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Alpokat		1.080		20	1.101	11	1.089
Jeruk		410		8	418	4	414
Duku		14		0	15	0	14
Durian		3.898		-	3.898	1	3.898
Jambu		1.278		24	1.302	13	1.289
Jambu Air		303		6	309	3	306
Mangga		46.587		-	46.587	761	45.825
Pepaya		1.695		32	1.727	18	1.709
Pisang		17.165		-	17.165	149	17.016
Rambutan		2.737		52	2.789	29	2.760
Sawo		227		4	231	2	229
Melon		327		6	333	3	330
Semangka		14		0	14	0	14
Belimbing		470		9	479	5	474
Manggis		170		3	173	2	171
Nangka		3.518		66	3.585	37	3.548
Sirsak		283		5	289	3	286
Sukun		301		6	307	3	304
Jeruk Besar		269		5	274	3	271
Buah Lainnya		870		16	886	9	877

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui total penyediaan bahan pangan kelompok buah-buahan. Data produksi buah-buahan yang tercantum di tabel NBM, tersedia di Kabupaten Madiun. Beberapa buah yang tidak diproduksi di Kabupaten Madiun antara lain nanas, salak, markisa, apel, anggur, stroberi, blewah, dll. Adapun buah yang paling banyak tersedia antara lain mangga dan pisang yaitu 46.587 ton dan 17.165 ton. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan penyediaan tahun 2019 sebesar 52.566 ton dan 22.766 ton.

- Kelompok Sayur-sayuran

Tabel 3.9 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Sayur-sayuran (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Bawang Merah	504	326		14	339	3	336
Ketimun		196		8	204	2	203
Kacang Panjang		160		7	167	1	165
Tomat		16		1	17	0	17
Cabe Rawit		130		5	136	1	135
Terong		218		9	227	2	225
Kangkung		31		1	33	0	32

Tabel 3.9 memberikan informasi total penyediaan bahan pangan kelompok sayur-sayuran. Berbeda dengan data ketersediaan buah, untuk data ketersedian sayur hanya sebagian kecil yang dapat dicantumkan. Jumlah data yang tercantum sama dengan data 2019 yang terdiri dari tujuh komoditas. Dengan kata lain, Kabupaten Madiun bukan sentra produksi hortikultura khususnya kelompok sayuran, dikarenakan mayoritas tanaman sayur lebih cocok ditanam di dataran tinggi dengan intensitas curah hujan yang tinggi.

- Kelompok Daging

Tabel 3.10 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Daging (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Daging Sapi	1.611	1.207		2	1.209	97	1.112
Daging Kambing	1.369	929		-	929	15	914
Daging Domba	69	50		-	50	1	49
Daging Ayam Buras		1.905		5	1.910	4	1.907
Daging Ayam Ras		1.991		-	1.991	1	1.990
Daging Itik		17		-	17	0	17
Daging Puyuh		3		-	3	0	3
Jeroan semua jenis	-	874		-	874	1	873

Tabel 3.10 memberikan informasi total penyediaan bahan pangan kelompok daging. Terdapat beberapa jenis daging yang tidak tercantum pada tabel NBM yaitu daging kerbau, daging kuda, dan daging babi, karena ketiga jenis daging tersebut tidak biasa dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Konsumsi daging biasa dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya. Seperti daerah yang menghormati sapi, maka masyarakatnya pantang memakan daging sapi, dan menggantinya dengan mengonsumsi daging kerbau. Dapat diketahui bahwa penyediaan daging terbanyak adalah daging ayam ras, daging ayam buras, dan daging sapi. Jika dibandingkan dengan penyediaan tahun 2019, penyediaan pada tahun 2020 tidak jauh berbeda. Penyediaan daging sapi mengalami peningkatan dari 1.091 ton menjadi 1.112 ton. Penyediaan daging ayam buras mengalami peningkatan dari 1.862 ton menjadi 1.907 ton. Penyediaan daging ayam ras menurun dari 2.000 ton menjadi 1.990 ton. Dirasa penting untuk menjaga

stabilitas produksi daging sapi dan daging ayam, sehingga terjangkau oleh masyarakat dan pemenuhan protein yang bersumber dari pangan hewani dapat terpenuhi.

- Kelompok Telur

Tabel 3.11 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Telur (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Telur Ayam Buras		985		3	987	2	985
Telur Ayam Ras		3.047		1	3.048	15	3.033
Telur Itik		318		0	318	0	318
Telur Puyuh		49		0	49	0	49

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat diketahui bahwa total penyediaan bahan pangan kelompok telur didominasi oleh telur ayam ras. Pengisian data produksi langsung pada kolom output, karena telur merupakan komoditas siap konsumsi. Penyediaan telur ayam ras pada tahun 2020 yaitu 3.033 ton, tidak jauh berbeda dengan penyediaan tahun 2019 sebesar 3.034 ton.

- Kelompok Susu

Tabel 3.12 Total Penyediaan Bahan Pangan Kelompok Susu (Ton)

Jenis Bahan Makanan	Produksi		Perubahan Stok	Impor	Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor	Ekspor	Penyediaan Dalam Negeri
	Input	Output					
Susu Sapi		184		0	184	0	184

Tabel 3.12 menyajikan data produksi susu sapi yang berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan kelompok susu. Sebenarnya, selain susu sapi terdapat pula susu impor dalam tabel NBM, namun tidak ditemukan data produksi susu impor di Kabupaten Madiun. Penyediaan susu sapi tahun 2020 sebesar 184 ton, jauh menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 366 ton. Nyatanya, konsumsi susu mayoritas masyarakat adalah dalam bentuk susu kemasan, selain susu segar. Data ketersediaan susu kemasan kiranya perlu diketahui sehingga mencerminkan ketersediaan yang sebenarnya di masyarakat.

Permasalahan:

Permasalahan utama di sektor distribusi dan ketersediaan pangan yang dialami daerah hampir semua datang dari permasalahan logistik yang terganggu akibat pandemi serta perubahan iklim secara global. Terganggunya sistem logistik pangan dan rantai pasok pangan menyebabkan masyarakat kehilangan akses pangan. Permasalahan lain yang berkaitan dengan pangan adalah ketersediaan lahan. Lahan pertanian kerap kali dialihfungsikan untuk keperluan industri dan yang lainnya. Akibatnya, lahan untuk bertani menjadi semakin sempit bahkan lahan pertanian menjadi rusak tercemar oleh limbah-limbah dari sektor industri.

Strategi Pemecahan Masalah :

Pemerintah Daerah harus bisa mengoptimalkan sumber pangan lokal yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, geografis dan pola masyarakat setempat di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk antisipasi atas kerentanan sistem pangan. Perhatian terhadap lahan pekarangan layak dihidupkan kembali. Lahan pekarangan dapat menjadi sumber produksi pangan lokal dalam lingkungan rumah tangga. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan pasokan pangan jika sewaktu waktu terdapat masalah dalam ketersediannya maupun dalam proses distribusi.

Sasaran 2 :
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi dan Kualitas Pangan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam, bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan Skor PPH Konsumsi. Khusus tahun ini penyusunan dan penghitu ngan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tidak bisa dilaksanakan karena adanya pandemi Covid19.Karena dalam pelaksanannya, kegiatan yang diperlukan untuk menyusun dan menghitung skor PPH konsumsi ini mengharuskan terjun langsung ke lapangan, langsung survey ke rumah rumah penduduk, dan itu tidak dimungkinkan di masa pandemi Covid19 ini. Jadi capaian indikator untuk tahun 2020 tidak bisa diketahui. Tetapi Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran ini dimana diharapkan, tingkat penganekaragaman konsumsi dan kualitas pangan di tahun 2020 tetap terjaga.

Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. 537,212,250,- terealisasi sebesar Rp. 492,079,481,- atau 91,59 % dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan anggaran Rp. 9.975.000,- realisasi Rp. 9.975.000,- atau 100%, realisasi fisik 100 %.
b. Pengembangan Olahan Pangan Lokal anggaran Rp. 3.005.050,- realisasi Rp. 3.005.050,- atau 100% realisasi fisik 100%.
c. Program Pekarangan Pangan Lestari anggaran Rp. 174.231.700,- realisasi Rp. 145.678.648,- atau 83,61%, realisasi fisik 100%.
d. Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Cukai) anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 136.158.183,- atau 90,77 %, realisasi fisik 100%.
e. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Fasilitas Promosi bagi Penganeka ragaman Konsumsi Pangan, dengan anggaran Rp. 200.000.500,- realisasi Rp. 197.262.600,- atau 98,63 %.

Permasalahan:

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, beberpa permasalahan dan kondisi di sektor penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan adalah sebagai berikut :

a. Upaya penggalian dan pemanfaatan sumber sumber pangan karbohidrat lokal belum optimal.
b. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam
c. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras
d. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah
e.Kemampuan memproduksi pangan lokal masih rendah, terutama musim paceklik
f. Penerapan teknologi produksi dan teknologi pengolahan pangan lokal di masyarakat belum mampu mengimbangi pangan olahan asal impor yang membanjiri pasar.
g. Kegiatan inspeksi dan monitoring mutu dan keamanan pangan yang belum merata di setiap wilayah dan belum terintegrasi antar instansi yang berwenang
h. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (produsen/petani/pedagang dan konsumen) tentang keamanan pangan.

Strategi Pemecahan Masalah :

a. Peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah
b. Komunikasi, informasi, dan edukasi serta promosi pangan lokal
c. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal
d. Peningkatan investasi agroindustri berbasis pangan lokal
e. Pengembangan agroindustri tepung berbasis sumberdaya lokal
f. Pengembangan agroindustri tanaman pangan, hortikultura, susu dan daging
g. Penelitian bahan pangan lokal untuk substitusi tepung terigu
h. Peningkatan ketersediaan buah dan sayuran untuk konsumsi
i. Inspeksi dan monitoring mutu dan keamanan pangan secara berkala dan merata di setiap wilayah dan melakukan integrasi antar instansi yang berwenang.

Sasaran 3 :

Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu meningkatnya produksi dan konsumsi hasil pertanian terutama untuk produksi daging, telur dan susu. Jumlah anggaran kegiatan yg mendukung sasaran ini sebesar Rp. 402.710.500,- terealisasi sebesar Rp. 394.676.400,- atau 98 % dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan dan pelatihan kelompok ternak di masa kenormalan baru) anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi Rp. 93.373.700,- atau 93,37 %, realisasi fisik 100%.

b. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan pembibitan, produksi dan reproduksi ternak di masa kenormalan baru) anggaran Rp. 125.000.000,- realisasi Rp. 124.238.300,- atau 99,39 %, realisasi fisik 100%.

c. Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular di masa kenormalan baru) anggaran Rp. 175.000.000,- realisasi Rp. 174.353.900,- atau 99,63 %, realisasi fisik 100%.

d. Pendistribusian hasil produksi peternakan anggaran Rp. 275.000,- realisasi Rp. 275.000,- atau 100 %, realisasi fisik 100%.

e. Rehabilitasi sarana prasarana peternakan anggaran Rp. 2.435.500,- realisasi Rp. 2.435.500,- atau 100%, realisasi fisik 100%.

Sasaran ini memiliki indikator kinerja : Angka Produksi Daging, Telur dan Susu, dimana semua terget produksi terpenuhi sesuai tabel berikut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Tahun 2020		
	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(%) Realisasi
Angka Produksi : (ton)			
1. Daging	7764	9551	123,01
2. Telur	4474	4490	100,35
3. Susu	201	223	110,94

Untuk detail produksi hasil peternakan tahun 2020 di Kabupaten Madiun bisa dilihat dalam penjabaran berikut :

REKAP PRODUKSI DAGING PER JENIS TERNAK

Provinsi : **JAWA TIMUR** : **2020**
Kabupaten : **Madiun**

No.	Kode	Jenis Ternak	Total Produksi Daging (Kg)
(1)	(2)	(3)	(8)
1	701	Kerbau	-
2	702	Kuda	-
3	703	Sapi Potong	**1,748,785**
4	704	Sapi perah	-
5	705	Babi	-
6	706	Domba	**167,341**
7	707	Kambing	**578,121**
8	708	Kelinci	**1,410**
9	712	Ayam Buras	**2,696,686**
10	713	Ayam Ras Pedaging	**4,177,719**
11	714	Ayam Ras Petelur	**138,610**
12	715	Burung Dara	**4,420**
13	716	Burung Puyuh	**6,327**
14	717	Itik	**22,636**
15	718	Entok	**9,756**
Total Produksi Daging			**9,551,810**

REKAP PRODUKSI TELUR PER JENIS TERNAK

Provinsi : **JAWA TIMUR** : **2020**
Kabupaten : **Madiun**

No.	Kode	Jenis Ternak	Total Produksi Telur (Kg)
(1)	(2)	(3)	(8)
1	712	Ayam Buras	**1,014,131**
2	714	Ayam Ras Petelur	**3,074,359**
3	716	Burung Puyuh	**49,789**
4	717	Itik	**324,951**
5	718	Entok	**26,820**
Total Produksi Telur			**4,490,050**

REKAP PRODUKSI SUSU PER JENIS TERNAK

Provinsi : **JAWA TIMUR** : **2020**
Kabupaten : **Madiun**

No.	Kode	Jenis Ternak	Total Produksi Susu (Kg)
(1)	(2)	(3)	(8)
1	704	Sapi perah	**213,831**
2	707-b	Kambing Perah	**9,271**
Total Produksi Susu			**223,102**

Permasalahan :

- Kondisi peternakan broiler hingga saat ini harganya masih fluktuatif dan bisa dikatakan rugi karena memang over supply (kelebihan pasokan). Di samping itu daya beli sedang turun akibat pandemi Covid-19
- Kondisi ternak besar khususnya sapi juga tidak stabil. Penyebabnya adalah penurunan daya beli dan juga ditutupnya pasar hewan oleh pemerintah setempat. Selain itu banyak peternak yang menahan ternak mereka untuk tidak dijual terlebih dahulu, dengan harapan bila dipelihara lebih lama akan bertambah besar/gemuk untuk sapi jantan sehingga harganya bisa lebih tinggi bila dijual, dan akan bisa beranak untuk sapi betina. Namun disisi lain hal ini meyebabkan bnyak terdapat kasus kawin berulang sapi (lebih dari 3x) untuk mencapai kebuntingan, sehingga produktifitas menurun.

Strategi Pemecahan Masalah :

- Adanya penyerapan harga minimum untuk daging ayam dan juga memperpendek mata rantai tata niaga ayam dengan cara membuat atau menjual kios-kios penjualan ayam yang didirikan perusahaan terintegrasi, yang menjual ayam segar dengan harga yang lebih kompetitif. Di sini harga karkas broiler lebih fair karena mengikuti turun naiknya harga ayam di tingkat peternak
- Bidang Peternakan akan membentuk enam tim Penanganan Gangguan Reproduksi yang akan disebar keseluruh kelompok ternak dan masyarakat sekitar yang telah didata. Tim bertugas untuk mendiagnosa, memberi pengobatan dan memonitor sapi yang mengalami gangguan di organ reproduksinya. sehingga bisa sembuh, bisa dikawin suntik lagi dan bisa bunting dengan normal lagi.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sebagaimana termuat dalam Rencana Anggaran dan Kegiatan yang telah disetujui, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun, besarnya anggaran 2020 adalah Rp. 5.585.713.503,- dan terserap sebesar Rp. 5.011.758.675,- yang terdiri dari Rp. 2.275.813.263,- untuk belanja tidak langsung , dan Rp. 2.735.945.412,- untuk belanja langsung. Jika dilihat dari realisasi anggaran persasaran, penyerapan anggaran terbesar ada pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat". Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan".

Tabel 3.14 Proporsi APBD Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun Empat Tahun Terakhir

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung		Belanja Langsung	
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	2017	2.322.202.083	1.670.864.393	2.391.019.100	1.905.311.007
2.	2018	2,133,117,781	1,605,660,900	2,409,160,300	1,910,051,330
3.	2019	2,158,169,168	1,435,534,893	2,051,439,551	1,674,936,013
4.	2020	2,603,958,737	2,275,813,263	2,981,754,766	2,735,945,412

3.4. ANALISIS EFISIENSI

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan output dan input baik untuk rencana maupun realisasi.Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di lampiran berikut :

REKAPITULASI BELANJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	KEGIATAN	BELANJA		SELISIH
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Gaji dan Tunjangan	2.603.958.737,00	2.275.813.263,00	328.145.474,00
2	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	446.215.268,00	431.433.069,00	14.782.199,00
3	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	76.572.150,00	60.569.500,00	16.002.650,00
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Fasilitas Promosi bagi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	200.000.500,00	197.262.600,00	2.737.900,00
5	Penanganan Daerah Rawan Pangan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00
6	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan pokok (Pajak rokok)	50.346.782,00	47.658.200,00	2.688.582,00
7	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	840.000.000,00	770.440.000,00	69.560.000,00
8	Analisis Ketersediaan Pangan	22.788.568,00	21.520.450,00	1.268.118,00
9	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan	89.987.280,00	82.856.916,00	7.130.364,00
10	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah untuk pembinaan kelompok lumbung dan pemberian bantuan isian lumbung	399.908.290,00	341.624.780,00	58.283.510,00
11	Penanganan Daerah Rawan Pangan untuk penyuluhan ketahanan pangan keluarga dan pemberian bantuan pangan sehat	68.030.278,00	63.095.966,00	4.932.312,00
12	Laporan Berkala Dewan Ketahanan Pangan	44.943.400,00	26.950.650,00	17.992.750,00
13	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00
14	Pengembangan Olahan Pangan Lokal	3.005.050,00	3.005.050,00	0,00
15	Program Pekarangan Pangan Lestari	174.231.700,00	145.678.648,00	28.553.052,00
16	Pembinaan Kemampuan Ketrampilan Kerja Masyarakat Melalui Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal (Cukai)	150.000.000,00	136.158.183,00	13.841.817,00
17	Pendistribusian hasil produksi peternakan	275.000,00	275.000,00	0,00
18	Rehabilitasi sarana prasarana peternakan	2.435.500,00	2.435.500,00	0,00
19	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan dan pelatihan kelompok ternak di masa kenormalan baru)	100.000.000,00	93.373.700,00	6.626.300,00
20	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pembinaan pembibitan, produksi dan reproduksi ternak di masa kenormalan baru)	125.000.000,00	124.238.300,00	761.700,00
21	Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular di masa kenormalan baru)	175.000.000,00	174.353.900,00	646.100,00
JUMLAH		**5.585.713.503,00**	**5.011.758.675,00**	**573.954.828,00**

Realisasi Belanja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun
Tahun Anggaran 2020

NO	U R A I A N	JUMLAH (Rp)		SISA ANGGARAN	
		ANGGARAN STLH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%
1.	2.	3.	4.	5 = 4 - 3	6 = 4/3
1	**BELANJA**	**5.585.713.503**	**5.011.758.675**	**573.954.828**	**89,72**
1.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**2.603.958.737**	**2.275.813.263**	**328.145.474**	**87,40**
	Belanja Pegawai	2.603.958.737	2.275.813.263	328.145.474	87,40
1.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.981.754.766**	**2.735.945.412**	**245.809.354**	**91,76**
	Belanja Pegawai	170.075.000	152.575.000	17.500.000	89,71
	Belanja barang dan jasa	2.783.337.016	2.555.027.712	228.309.304	91,80
	Belanja Modal	28.342.750	28.342.700	50	100,00
	Jumlah Belanja	**5.585.713.503**	**5.011.758.675**	**573.954.828**	**89,72**

Dalam pengelolaan belanja, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menekankan tentang penggunaan belanja daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Pada Tahun 2020 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp. 5.585.713.503,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.011.758.675,- atau sebesar 89,72 %. Sehingga terjadi kelebihan/efisiensi belanja sebesar 10,28 % dari program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.